

SIARAN PERS

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALBAR TAHUN ANGGARAN 2017

Pontianak, Kamis (31 Mei 2018) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017, dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini, Kamis 31 Mei 2018 telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, yang diserahkan oleh Anggota VI BPK RI **Dr. Harry Azhar Azis, M.A.**, di dampingi oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat **Rita Amelia, S.E., M.M., Ak.**, dalam Sidang Paripurna Istimewa bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 diserahkan kepada Ketua DPRD dan kepada Gubernur Kalimantan Barat. LHP atas LKPD Tahun 2017 terdiri dari tiga laporan yaitu LHP atas LKPD Tahun 2017, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual dan merupakan Tahun ketiga Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Jumlah laporan keuangan terdiri dari 7 laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini **"Wajar Tanpa Pengecualian"** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017.

Pencapaian opini WTP ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran OPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan administrasi yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya:

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar

Jl. Ahmad Yani, Pontianak Telp. (0561) 585349 ext. 205

Website: pontianak.bpk.go.id, Email: bpkpontianak@gmail.com

1. Pengelolaan persediaan Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya tertib;
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat kurang memadai;
3. Penatausahaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kalimantan Barat belum tertib.

Dalam pidatonya, Anggota VI BPK RI menyinggung peran strategis BPK dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan amanat UUD 1945 BPK ditugaskan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga keuangan Negara dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Anggota VI BPK mengapresiasi beberapa indikator – indikator fundamental pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat seperti tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan *gini ratio* yang lebih baik dibandingkan dengan indeks rata – rata nasional. Namun Anggota VI BPK juga mengingatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat tiga tahun terakhir di bawah rata – rata nasional, untuk itu diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat melakukan upaya – upaya strategis untuk meningkatkan IPM yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Selain itu inflasi Provinsi Kalimantan Barat masih lebih tinggi daripada rata-rata inflasi nasional dan pendapatan per kapita masyarakat Kalimantan Barat masih lebih rendah dibandingkan pendapatan per kapita nasional. Karena pencapaian Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Barat belum tercapai.